

Dinamika Pembangunan Jembatan Siratal Mustaqim Untuk Menopang Wisata Religi

Hifzil Alifan Cahya¹, Yusuf Adam Hilman^{2*}, Irvan Nur Ridho³, Bambang Triono⁴,

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Jawa Timur, Indonesia

E-mail: Hifzilalifancahya2@gmail.com¹, adam_hilman@umpo.ac.id²,
irvannurridho@gmail.com³, bambangtriono@umpo.ac.id⁴

^{1,2,3,4} Jalan Budi Utomo No II Ronowijayan, Siman, Ponorogo, Indonesia

Korespondensi penulis: adam_hilman@umpo.ac.id

Abstract.

The level of government in Indonesia is arranged hierarchically at the central to regional levels, the village is the smallest level of government, with the task and function of developing and building villages in order to realize prosperity for its people, Tegalsari Village, Jetis District, Ponorogo Regency, is trying to carry out development to support local potential, namely religious tourism, how are these efforts carried out. This study aims to determine the dynamics of the development of the siratal mustaqim bridge. This study uses a descriptive qualitative method. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The results of this study describe the role of the village government in the construction of the siratal mustaqim bridge. During the preparation of the development plan to the evaluation of the implementation, the village government was actively involved in the process. In preparing the plan, the government periodically submitted the construction of the bridge 5 times by collaborating with related parties. To determine the plan, Law Number 13 of 2021 concerning the development and development of village potential is used. At the implementation stage of development, the community and government work together to help provide manpower and coordination to related parties. At the evaluation stage, it went smoothly from all parties with the success of the construction of this siratal mustaqim bridge. The community hopes that they can continue to care for and maintain the sustainability of this bridge so that this bridge can continue to be used without any problems.

Keywords: Construction, Bridge, Tegalsari, Village Government

Abstrak.

Level pemerintahan di Indonesia tersusun secara hierarkis di level pusat hingga daerah, desa merupakan level pemerintahan terkecil, dengan tugas dan fungsi untuk melakukan pengembangan dan pembangunan desa agar terwujud kesejahteraan bagi masyarakatnya, Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, berupaya untuk melakukan pembangunan untuk mendukung potensi lokal yakni wisata religi yang dimiliki, bagaimana upaya tersebut dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika pengembangan jembatan siratal mustaqim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu menggambarkan tentang peran pemerintah desa dalam pembangunan jembatan siratal mustaqim. Pada saat penyusunan rencana pembangunan hingga evaluasi pelaksanaan pemerintah desa ikut terlibat secara aktif dalam proses tersebut. Pada penyusunan rencana pemerintah secara berkala mengajukan pembangunan jembatan 5 kali dengan menggandeng pihak terkait. Untuk penetapan rencana menggunakan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2021 tentang pembangunan dan pengembangan potensi desa. Pada tahap pelaksanaan pembangunan masyarakat dan pemerintah bergotong-royong membantu tenaga dan koordinasi kepada pihak terkait. Pada tahap evaluasi berjalan dengan lancar dari semua pihak dengan keberhasilan pembangunan jembatan siratal mustaqim ini. Masyarakat berharap agar dapat senantiasa merawat dan menjaga kelestarian jembatan ini agar jembatan ini dapat terus digunakan dengan tanpa kendala.

Kata kunci: Pembangunan, Jembatan, Tegalsari, Pemerintah Desa

Received: Juni 13, 2024; Revised: Juli 19, 2024; Accepted: Juli 28, 2024; Published: Juli 31, 2024;

1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara terstruktur pada tingkat pusat hingga tingkat daerah. Peran pemerintah sangat berpengaruh pada lingkup terkecil sekalipun hanya di level desa. Pengelolaan pada tingkat desa mempunyai fungsi esensial dalam pembangunan negeri karena menjadi dasar atau pijakan dari pembangunan pada skala yang lebih besar. Pengembangan masyarakat dapat dilakukan melalui proyek pengembangan masyarakat yang berhubungan langsung dengan kegiatan masyarakat. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan perkotaan adalah pembangunan jembatan sebagai jalan penghubung. Menurut teori, pembangunan desa memanfaatkan apa yang terjadi di masyarakat, seperti membangun atau memperbaiki jalan pedesaan, dapat membantu meningkatkan kualitas hidup penduduk pedesaan (Fazli, 2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Husen & Baranyanan 2021) pembangunan jembatan sebagai penghubung jalan antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebab dapat memudahkan dan melancarkan aktivitas masyarakat di daerah tersebut. Besarnya dampak positif yang akan diperoleh masyarakat, memerlukan upaya yang besar pula dalam mewujudkannya. Program pembangunan jembatan ini tidak dapat dilakukan oleh satu atau dua pihak saja, melainkan dibutuhkan sinergi berbagai pihak dalam lingkup masyarakat untuk proses pembangunannya. Pihak yang terlibat dalam program pembangunan jembatan diantaranya seperti masyarakat, pemerintah desa, dunia usaha, lembaga swadaya (LSM) dan lain sebagainya.

Upaya pengembangan desa dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur jalan juga dilaksanakan oleh salah satu desa di Kabupaten Ponorogo tepatnya di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Terdapat program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Desa Tegalsari yaitu program pembangunan Jembatan Siratal Mustaqim. Pembangunan jembatan bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat Desa Jetis dalam melaksanakan kegiatan antar desa sekaligus menjadi sarana penghubung antara Jalan Raya Jetis dengan Makam Kyai Ageng Muhammad Besari yang terkenal sebagai wisata religi. Adanya pembangunan jembatan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi melalui peluang wisata religi di desa tersebut. Sesuai

dengan Peraturan Desa Tegalsari Nomor 13 Tahun 2021 tentang pengelolaan wisata desa Tegalsari.

Adanya potensi besar pengembangan desa dengan pembangunan Jembatan Siratal Mustaqim bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Tegalsari, sangat disayangkan apabila tidak dapat dikelola secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah desa dalam proses pengembangan. Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Dinamika Pembangunan Jembatan Siratal Mustaqim untuk menopang wisata Religi”**

2. KAJIAN TEORITIS

Desa adalah bagian terkecil dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (RI BARU) (sebelum direvisi). Desa adalah suatu kesatuan hukum terbatas yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengawasi kepentingan penduduk setempat, suatu kekuasaan yang diakui dan dihormati oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kualitas suatu desa ditentukan oleh rencana pembangunannya. Secara umum, tujuan peningkatan kapasitas desa adalah untuk mewujudkan hak-hak lokal desa dengan menciptakan lebih banyak peluang, memperkuat kelembagaan, dan memberdayakan masyarakat (Soleh 2017). Rencana pembangunan desa melalui pembangunan jembatan dikelola oleh SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) yang ditetapkan oleh pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1. Bab 4 Pasal 8 Dokumen Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tahapan perencanaan pembangunan yang terdiri atas empat bagian: (1) perencanaan, (2) perencanaan, dan (3) pengelolaan proyek. (4) Evaluasi. Implementasi kebijakan ini (UU No. 25 Tahun 2004). Hal ini dapat dipahami sebagai berikut: 1). Penyusunan Rencana, 2). Penetapan Rencana, 3).Pengendalian Pelaksanaan Rencana, 3). Evaluasi Rencana.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informasi berasal dari wawancara, catatan lapangan, catatan pribadi dan dokumen resmi. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan apa yang terjadi di lapangan sehingga pembaca dapat memahami keadaan di lapangan. Penelitian ini memadukan teori terapan dengan pengalaman lapangan aktual melalui analisis deskriptif. Lokasi penelitian ini yaitu berada

di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur tepatnya pada proses pembangunan Jembatan Siratal Mustaqim yang merupakan program pemerintah desa. Dalam penelitian ini, subjek/ informan yaitu pemerintah desa Tegalsari. Pemilihan informan pada penelitian ini didasarkan pada peran pemerintah yang terlibat selama pembangunan jembatan siratal mustaqim. Selain itu, pemilihan informan pada penelitian ini juga berdasarkan orang yang terlibat secara aktif selama proses pembangunan jembatan siratal mustaqim.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pelaksanaan pembangunan jembatan siratal mustakim, berjalan sebagai berikut:

“Penyusunan rencana pembangunan jembatan ini sudah sejak lama dan menjadi idam-idaman para warga sekitar untuk menjadi penghubung antara dukuh setono dan tegalsari serta menjadi penghubung untuk tujuan wisata religi antara makam kiai ahmad besari, M nur shodiq dan masjid baiturrahman yaitu tempat kiai ahmad besari mencari ilmu sewaktu kecil. Jadi warga desa pada umumnya tidak perlu berjalan memutar melewati desa wonoketro ketika ingin menuju tegalsari maupun dusun setono.” (Huda, 2024).

Selain hasil wawancara, kami juga melakukan observasi, dan kami menemukan fakta jika, pemerintah desa berperan secara aktif dalam penyusunan rencana pembangunan jembatan tersebut. Pemerintah desa Tegalsari senantiasa berkoordinasi dan saling bekerja sama dalam proses penyusunan rencana pembangunan jembatan tersebut. Setelah penyusunan rencana selesai dilakukan, selanjutnya ditetapkan rencana pembangunan jembatan jembatan siratal mustaqim. Adapun keterangan mengenai penetapan rencana pembangunan ini dijelaskan oleh bapak Moh. Riyono selaku Kepala Tata Usaha dan Umum desa Tegalsari sebagai berikut:

“Proses penetapan rencana pembangunan jembatan gantung siratal mustaqim ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2021 yang membahas tentang desa. Fokusnya disini yakni pelaksanaan pembangunan desa. Ini yang menjadi dasar pengajuan program sehingga bisa diajukan dan berhasil memperoleh dana dari pemerintah. Kemudian baru dilakukan penetapan SK dan perencanaan akhir dan lain sebagainya dari desa” .

Mendukung pernyataan tersebut, kepala desa Tegalsari menambahkan jawaban sebagai berikut:

“Terkait dengan jembatan siratal mustaqim ini ada anggaran pusat dari APBD dari pak Ali Mufti yang sudah dijanjikan. Selain itu, terdapat pula nomor kontrak HK.0201-Bb8.7/2.3/1605 dengan kegiatan satuan kerja pelaksana jalan nasional wilayah II provinsi Jawa Timur dengan nama paket Pembangunan Jembatan Gantung Tegalsari sejumlah Rp. 2.607.447.000,00 dengan penyedia jasa CV Dewi Baraja dan konsultan Supervisi PT. Winsolusi Konsultan. PT. Pola Agung, dan PT Anugrah KridaPradana. Selain itu terdapat juga keputusan kepala desa Tegalsari terkait dengan pembangunan jembatan ini yaitu SK nomor 188/23/Kepts/403.402.10/2023 tentang program pembangunan jembatan Siratal Mustaqim ini yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk dari apresiasi dari pemerintah desa atas persetujuan pengajuan dan penyusunan program pembangunan jembatan siratal mustaqim ini” (Khoirul Huda,2024)

Penyusunan rencana jembatan gantung siratal mustaqim ini merupakan salah satu program desa yang sudah diajukan sejak lama oleh pemerintah desa Tegalsari kepada pemerintah pusat. Perencanaan pembangunan ini oleh masyarakat desa tegalsari dijadikan harapan agar warga lebih mudah dalam mengakses jalan dalam desa. Sejalan dengan hal tersebut, (Adisasmita, 2006) menjelaskan Membangun desa sebagai bagian dari pembangunan daerah berarti mengembangkan masyarakat pedesaan dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat. Penetapan rencana pembangunan jembatan siratal mustaqim ini dilandasi oleh peraturan undang-undang terkait dengan otonomi pemerintah desa untuk mengembangkan wilayahnya. Adapun dalam proses penetapan rencana ini semua pihak dilibatkan dalam keberjalanannya, baik dari pemerintah desa, tokoh-tokoh desa hingga masyarakat desa. Selama penetapan rencana dilakukan, seringkali diadakan musyawarah yang melibatkan masyarakat dan tokoh desa agar semua pendapat dapat tersampaikan. Seperti yang dikatakan (Huraerah, 2013), bahwa dalam pembangunan masyarakat bisa berperan untuk menyumbangkan pemikiran.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan jembatan gantung ini melibatkan seluruh pihak desa baik dari pemerintah desa, tokoh desa dan warga sekitar.

“Masyarakat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan jembatan. Mereka sangat antusias dengan pembangunan jembatan gantung siratal mustaqim ini. Masyarakat antusias atas hal ini dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan terkait dengan pengawalan dan tenaga kerja bantuan. Hal ini dibuktikan dari partisipasi masyarakat pada saat pada saat proses pembangunan, masyarakat membantu kelancaran kegiatan tersebut seperti air, pembebasan lahan, pembersihan lahan dan kegiatan-kegiatan lain.” (Tamamul Asrofin, 2024)

Pengendalian pelaksanaan rencana dalam proses pembangunan jembatan gantung siratal mustaqim dilakukan untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan agar berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang menghambat selama proses berjalan. Tjokroamidjojo (1982) menganggap bahwa tujuan pembangunan dapat tercapai jika melibatkan seluruh masyarakat dalam suatu negara. Masyarakat harus mempunyai porsi peran dan posisi yang seimbang dengan pemerintah. Setelah proses pembangunan jembatan selesai dilakukan, evaluasi pelaksanaan pembangunan jembatan dilakukan oleh semua pihak, baik dari pemerintah desa, masyarakat, pekerja dan seluruh pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, tidak terdapat kendala selama proses pembangunan dan semua pihak senang atas keberhasilan pembangunan jembatan ini. (Huraerah, 2011) menjelaskan keberhasilan suatu program pembangunan bukan hanya berdasarkan pada kemampuan pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan.

Setelah pembangunan jembatan siratal Mustaqim ini selesai, pada tahap evaluasi pelaksanaan rencana secara umum sudah berjalan dengan baik. Pembangunan jembatan ini dari awal persetujuan hingga selesai pembangunan tidak ada kendala yang menghambat pembangunan jembatan. Selain itu, dari proposal pengajuan hingga laporan setelah pembangunan kami dari pemerintah desa mendapati tidak ada keluhan atau revisi.

“Semoga hal ini menjadi awal yang baik buat semua pihak dan jembatan ini semoga awet. dari proses keberjalanan pembangunan jembatan sendiri, para pekerja maupun warga yang membantu tidak ada laporan masuk terkait dengan kendala selama pembangunan jembatan. Mereka ketika ditanyai apakah ada evaluasi atau tidak menjawab lancar semuanya. Kedepannya, mereka berharap agar jembatan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga dan semoga mereka dapat menjaga dan merawat jembatan ini karena pembangunan jembatan ini sudah ditunggu-tunggu dari lama” (Huda, 2024).

Hasil dari evaluasi pembangunan jembatan siratal mustaqim ini secara keseluruhan dianggap bagus oleh pemerintah desa. Peran kooperatif dari semua pihak sangat membantu kelancaran pembangunan jembatan. Tjokroamidjojo (1982) menganggap bahwa tujuan pembangunan dapat tercapai jika melibatkan seluruh masyarakat dalam suatu negara. Masyarakat harus mempunyai porsi peran dan posisi yang seimbang dengan pemerintah. Setelah evaluasi dilakukan, pemerintah mengharapkan agar jembatan ini berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, semua pihak diharapkan menjaga dan merawat jembatan ini karena setelah 5 tahun diajukan jembatan ini akhirnya berhasil

dibangun dan dapat digunakan. Selain itu, alasan pendukung persetujuan pembangunan jembatan ini yaitu menjadi akses utama penghubung dusun setono dan tegalsari. Selain itu, dalam sektor pariwisata juga terdapat alasan yakni terdapat masjid Baiturrahman yang menjadi salah satu pelengkap destinasi wisata religi kompleks tegalsari.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dinamika pengembangan pembangunan jembatan gantung siratal mustaqim yang ada di desa Tegalsari dimulai dari penyusunan rencana pembangunan hingga evaluasi. Pada tahap penyusunan rencana sudah 5 kali diajukan dari tahun 2019 dengan menggandeng seluruh pihak terkait dan berwenang untuk membantu persetujuan pembangunan jembatan ini dari pemerintah desa ke pemerintah pusat. Selanjutnya pada tahap penetapan rencana terdapat landasan hukum yang digunakan yaitu Undang-undang nomor 13 Tahun 2021 tentang pembangunan dan pengembangan potensi Desa. Pada tahap pelaksanaan pembangunan masyarakat secara aktif terlibat dan antusias dalam membantu selama proses pembangunan jembatan gantung siratal mustaqim. Pada tahap evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jembatan gantung siratal mustaqim ini berjalan dengan lancar dari semua pihak dan tidak terdapat kendala selama proses pembangunan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah mendukung terselesainya artikel penelitian dari hasil tugas akhir atau skripsi.

DAFTAR REFERENSI

- Adisasmita, R. (2006). Membangun desa partisipatif. Graha ilmu.
- Fazli, Lalu Moh. Nazar. (2017). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara). *Jurnal SIKAP* 1(1): 11–22.
- Huraerah, A. (2011). Kebijakan perlindungan sosial: Teori dan aplikasi Dynamic Governance. Nuansa Cendekia.
- Huraerah, A. (2013). Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 3-13.

- Husen, A., & Baranyanan, A. S. (2021). Pengaruh pembangunan infrastruktur pelabuhan, infrastruktur jalan dan infrastruktur jembatan terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. *Poros Ekonomi*, 10(1).
- Soleh, A. (2017). Strategi pengembangan potensi desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32-52.
- Soleh, Ahmad. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai* 5(1): 32–52.
- Tjokroamidjojo. (1982). *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Penerbit Gunung Agung.